



PENERAPAN KEBIJAKAN PROGRAM PILOTING DI DESA PADASUKA KECAMATAN CIBATU KABUPATEN GARUT

Hasbi Shiddiq Fauzan

Dosen Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut

hasbishiddiqfauzan@fisip.uniga.ac.id

Abstrak

Kebijakan program piloting sebagai salah satu cara pengentasan kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor peternakan dan pemberdayaan usaha ternak. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan bahwa metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menilai secara kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang. Data dikumpulkan langsung di pusat kegiatan informan dan dilakukan wawancara bebas dan tidak terstruktur kepada informan dalam suasana yang kondusif. Analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun untuk memeriksa keabsahan data dilakukan dengan ketekunan pengamatan, *triangulasi* dan diskusi dengan teman sejawat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tersebut telah terbangun beberapa kesepakatan yang akan dijadikan rencana kerja tindak lanjut terhadap pelaksanaan bantuan. Kebijakan program piloting, sebetulnya pemerintah tinggal terfokus terhadap penyediaan bibit pejantan unggul untuk memperbaiki ternak rakyat. Agar kegiatan peternakan dan ternak tumbuh lebih banyak, diperlukan upaya penyuluhan kepada masyarakat khususnya petani di daerah pedesaan.

Kata kunci: Kebijakan, Program Piloting, Kesejahteraan.

1 Pendahuluan

Berdasarkan pertimbangan aspek kebijakan, ketersediaan sumber daya, sosial ekonomi dan teknis, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten pada Tahun 2016 untuk mengalokasikan kegiatan penguatan perbibitan domba. Selanjutnya ditetapkannya wilayah sumber bibit domba di kabupaten terpilih. Menurut Ubaedillah dan Rozak bahwa kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi harus pula disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia.¹ Dalam

¹ Karena disamping daerah otonom provinsi juga merupakan daerah administratif, maka kewenangan yang ditangani Provinsi/Gubernur akan mencakup kewenangan dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi. Lihat A. Ubaedillah dan Abdul Rozak. (2006). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE-UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 192-193.

pelaksanaannya kegiatan penguatan perbibitan domba di Kabupaten terpilih Tahun 2016 diharapkan dapat berjalan dan terencana dengan baik. Maka disusunlah pedoman pelaksanaan penguatan pembibitan domba di Kabupaten terpilih, salah satunya Kabupaten Garut.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab dalam pengembangan subsektor peternakan di Jawa Barat. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan bidang pertanian, sub urusan peternakan meliputi, ketersediaan dan distribusi, konsumsi dan pengembangan sumber daya manusia, produksi peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Kenyataannya bahwa hampir seluruh jenis ternak di wilayah Jawa Barat, terdapat kendala mengenai produksi perternakan. Permasalahan tersebut berhubungan juga dengan permasalahan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1 Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

No.	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Permasalahan
1.	Produksi peternakan	Belum terpenuhinya kebutuhan bibit ternak	a. Program perbibitan ternak di masyarakat, membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama. b. Program perbibitan ternak kurang memberikan keuntungan yang memadai. c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi budidaya peternakan. d. Pembinaan dan pengawasan mutu pakan ternak belum optimal. e. Terbatasnya jumlah petugas pengawas mutu pakan ternak.

Sumber: Subbagian Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat (2017)

Saat ini, di Tahun 2016 bahwa terkait kebutuhan bibit ternak masih ada beberapa permasalahan seperti yang telah disebutkannya diatas. Kemudian yang harus menjadi perhatian adalah pada jalur hulu peternakan di Jawa Barat. Perhatian pemerintah terhadap pengembangan peternak menjadi faktor lemahnya advokasi dan kepedulian peningkatan kapasitas produksi peternakan. Menurut Fisher, sudah tentu, keteraturan yang mengikuti peraturan tidak memerlukan adanya ketertiban kondisi pendahulu apapun sebagaimana dalam pernyataan kondisional (jika-maka).² Jika pendahulu sudah memusatkan perhatian terhadap pengembangan perternakan, maka disana akan adanya peningkatan kapasitas produksi perternakan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dalam

² Pada kenyataannya, logika kondisional barangkali tidak sesuai dan bahkan tidak relevan dengan pernyataan suatu peraturan. Kondisi pendahulu apapun tidak memerlukan (baik sebagai suatu yang diperlukan ataupun sebagai suatu kondisi yang mencukupi) suatu konsekuensi. Lihat B. Aubrey Fisher. (1978). *Teori-Teori Komunikasi*, terjemahan Soejono Trimono. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, hlm. 111.

kapasitasnya sebagai fasilitator, akselerator dan regulator urusan dan kewenangan pemerintah pada sektor peternakan di Jawa Barat mempunyai kewajiban mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang peternakan. Dengan kondisi latar belakang tingkat pengangguran dan kemiskinan di Jawa Barat serta potensi sumber daya peternakan yang dimiliki tersebut. Maka perlu kiranya dilaksanakan Program Peningkatan Produksi dengan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Usaha Peternakan. Usman mengatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi kehilangan (*deprivation*) terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan serta hidupnya serba kekurangan.³

Program percepatan penanggulangan kemiskinan yang sudah diselenggarakan secara intensif sejak tahun 2010 melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 465.05/kep.1483-Bapp/2010. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat memiliki program Penanggulangan Kemiskinan diantaranya Program Piloting. Kegiatan-kegiatan strategis antara Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terkoordinasi dan bersinergi dengan Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati Garut, baik dari sisi program, pembiayaan maupun pada sisi pelaksanaan di lapangan yang akan di anggarkan kedepannya secara berkelanjutan.

Tiga tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut masih berfluktuatif, dengan persentase penduduk miskin masih jauh di bawah persentase miskin penduduk Jawa Barat yang mencapai 8,71 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut pada 2014 mencapai sebanyak 315.600 jiwa. Jumlahnya naik pada 2015 menjadi sebanyak 325.700, dan menurun pada 2016 menjadi sebanyak 298.500 jiwa. Persentase penduduk berada di bawah garis kemiskinan pada 2014 tercatat mencapai sebesar 12,47 persen, lalu naik pada 2015 menjadi 12,81 persen, dan pada 2016 menurun menjadi 11,64 persen. Garis kemiskinan penduduk Garut sendiri pada 2014 mencapai Rp234.661 per kapita per bulan, meningkat pada 2015 menjadi Rp241.068 per kapita per bulan, dan naik lagi pada 2016 menjadi Rp256.770 per kapita per bulan. Kemiskinan didefinisikan BPS sebagai ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Sedangkan penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.⁴

Dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut, pemerintah telah berusaha menetapkan anggaran dalam penanggulangannya, tetapi masih saja ada permasalahan ditataran internal maupun eksternalnya. Tanjung menyatakan bahwa, anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode.⁵ Maka dalam anggaran tersebut yang kemudian Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten melalui Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati Kabupaten Garut mencanangkan dan melaksanakan pelaksanaan program pengembangan peternakan, melalui program piloting yang

³ Sunyoto Usman. (2003). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 33.

⁴ Nul Zainul Mukhtar. (2017). *Kemiskinan Di Garut Fluktuatif*. (Online). (<http://www.inilahkoran.com/berita/jabar/70965/kemiskinan-di-garut-fluktuatif>, diakses 27 Juli 2017).

⁵ Abdul Hafiz Tanjung. (2009). *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta, hlm. 81.

dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati Kabupaten Garut di Desa Padasuka Kecamatan Cibatu serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Pelaksanaan kegiatan proyek percontohan (program piloting) yang dirancang sebagai pengujian atau trial dalam rangka untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program, mengetahui dampak pelaksanaan program dan keekonomisannya. Untuk menggerakkan kembali peternakan, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisi pemerintah. Melalui program piloting dirumuskan kembali mekanisme upaya pembangunan peternakan yang melibatkan unsur pemerintahan dan masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis masyarakat, dapat ditumbuhkembangkan sehingga pemerintah dan masyarakat bukan lagi sebagai objek melainkan sebagai subjek. Dalam upaya pembangunan peternakan. Program piloting meliputi jenis-jenis kegiatan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam sekitar lokasi kelompok, seperti bibit ternak, limbah tanaman untuk pakan ternak.
- b. Meningkatkan keterampilan peternak mengelola usaha peternakan domba secara profesional sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatannya.
- c. Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak dalam upaya perbaikan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak.
- d. Memberikan bantuan ternak domba, bantuan pakan tambahan, konsentrat dan bantuan pembuatan kandang.

Berbagai jenis kegiatan tersebut memiliki kriteria yang dijadikan dasar pelaksanaan program piloting yang dilakukan oleh Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati Garut di Desa Padasuka Kecamatan Cibatu, yaitu bagaimana mengutamakan lokasi peternakan yang masih tertinggal, berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan dapat dikerjakan oleh masyarakat, serta didukung oleh sumber daya yang memiliki potensi pengembangan peternakan yang berkelanjutan.

2 Kajian Teori

2.1 Perumusan Kebijakan

Perumusan (Formulasi) dalam kebijakan merupakan salah satu indikator dari tahap rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang akan diselenggarakan. Sebelum kebijakan ditetapkan dan diselenggarakan, awalnya masalah-masalah publik diidentifikasi, selanjutnya masuk pada bagaimana kebijakan publik itu dirumuskan, dalam tahap ini, aktor-aktor yang terlibat harus paham betul esensial dari proses perumusan kebijakan karena dengan demikian aktor-aktor tersebut dapat memperkirakan seperti apakah kebijakan publik tersebut akan dirumuskan, dan bagaimana masalah publik tersebut akan didefinisikan. Menurut Dunn perumusan kebijakan (*policy formulation*) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah.⁶ Dan menurut Winarno menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing untuk di pilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah.⁷ Maka perlu kiranya dalam sebuah proses menuju perumusan kebijakan, diperlukan aktor-aktor yang handal dan

⁶ William N. Dunn. (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 608.

⁷ Budi Winarno. (2005), *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, hlm. 29.

memahami tentang kebijakan tersebut, sehingga dalam pemilihan kebijakan mana yang harus diambil dan pantas untuk diterapkan serta kongkret bagi kegiatan kedepannya. Aktor tersebutlah yang berperan vital.

2.2 Implementasi Kebijakan

Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan. Meskipun masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik yaitu melalui kebijakan publik.⁸ Karakteristik masalah publik yang harus diatasi, selain bersifat interdependensi (berketergantungan) juga bersifat dinamis. Sehingga pemecahan masalahnya memerlukan pendekatan holistik (*holistic approach*), yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai kegiatan dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan, atau diukur secara terpisah dari yang faktor lainnya. Nugroho menjelaskan bahwa kebijakan publik berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional suatu bangsa dapat dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan, untuk mencapai tujuan nasional dan keterukurannya dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauhmana kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh.⁹ Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi pencapaian tujuan maupun pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya. Tujuan kebijakan publik adalah bagaimana dapat diperolehnya dan diterima nilai-nilai oleh publik, baik yang bertalian dengan *public goods* (barang publik) maupun *public service* (jasa publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.¹⁰ Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Tachjan menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu, (1) Unsur pelaksana. (2) Adanya program yang dilaksanakan. (3) Target group atau kelompok sasaran.¹¹ Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock dan Dimock dalam Tachjan menyatakan pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.¹²

⁸ Nugroho J. Setiadi. (2003), *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenanda Media, hlm. 58.

⁹ Nugroho J. Setiadi (2003), *Ibid.* Hlm. 52

¹⁰ Budi Winarno. *Op.cit.*, hlm. 102.

¹¹ Tachjan (2006), *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: API Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad, hlm. 26.

¹² Tachjan (2006), *Ibid.* Hlm. 28

2.3 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Dunn memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa, secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.¹³ Evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2006:186) bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.¹⁴ Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.

2.4 Kebijakan Program Piloting Sebagai Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan pertimbangan aspek kebijakan, ketersediaan sumber daya, sosial-ekonomi dan teknis, Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yaitu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut jenis ternak domba Garut melalui Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati Garut yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengujian dan pengembangan perbibitan ternak domba di Jawa Barat, sebagai: (1) Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pengembangan perbibitan ternak domba. (2) Penyelenggaraan pengujian dan pengembangan perbibitan ternak domba.

Tujuan pelaksanaan kebijakan program piloting dalam pedoman penguatan pembibitan domba di Kabupaten terpilih adalah mengembangkan pembibitan ternak domba yang mengupayakan kegiatan-kegiatan yang strategis dalam kelestarian dan kecukupan sumber bibit di dalam Negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan impor. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan prinsip-prinsip pembibitan antara lain: Sarana, manajemen pemeliharaan, produksi bibit (perkawinan, recording, seleksi, replacement dan sertifikasi). Dalam rangka pelaksanaan kegiatan diperlukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan realisasi (segi fisik maupun keuangan). Disamping itu dapat terkendalikan secara cepat berbagai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan kelompok serta memberikan saran alternatif pemecahan masalah. Untuk menjaga transparansi penggunaan dana di satuan kerja tersebut, perlu dilakukan pemantuan secara intensif dan berjenjang dengan mekanisme, melalui: (1) Tim Pusat melakukan pemantauan baik progres realisasi fisik maupun keuangan di Provinsi dan kelompok. (2) Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis melakukan pemantauan baik progres realisasi fisik maupun keuangan.

¹³ William N. Dunn. *Op.cit*, hlm. 608.

¹⁴ Leo Agustino. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, hlm. 186.

Sasaran utama kegiatan ini adalah masyarakat atau petani yang tergabung dalam kelompok yang sudah biasa atau berpengalaman beternak domba, pemuda-pemuda putus sekolah dan masyarakat lainnya yang memiliki keinginan dan kemauan untuk beternak domba secara profesional. Selain itu mereka juga harus mau berkelompok dan mau mengikuti model bentuk kerjasama atau aturan yang disepakati. Keluaran dari terbentuknya suatu kawasan pengembangan peternakan rakyat sebagai program piloting dengan orientasi kelompok yang berbasis agribisnis dengan pola dan pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan sumber daya alam yang ada. Pola pengembangan peternakan domba berupa sistem kelompok kandang kolektif. Sistem kandang kolektif merupakan pola pemeliharaan domba dalam satu kandang besar yang di bangun secara gotong royong oleh para peternak. Untuk difungsikan sebagai wadah kerjasama kelompok, unit usaha adomba dan multi fungsi lainnya. Penetapan pengembangan peternakan dengan sistem ini dilandasi pertimbangan pemeliharaan domba yang lebih intensif.

3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵ Metode ini ditujukan untuk menggambarkan, mendeskripsikan dan mengkaji perkembangan fakta dilapangan dengan pendekatan kualitatif, dengan bagaimana kebijakan program piloting yang dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati Garut. dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut terlaksana dengan baik, maksimal dan optimal.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Kepala Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati Garut. (2) Pembina kelompok program piloting yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati Garut. yang berjumlah 1 orang, (3) Kepala Desa. (4) Fasilitator Desa 1 Orang. (5) Ketua kelompok program piloting dan (6) Masyarakat penerima manfaat yang berjumlah 4 orang. Maka jumlah keseluruhan informan berjumlah 9 orang. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di pusat-pusat kegiatan informan dan melakukan wawancara bebas dan tak berstruktur kepada informan dalam suasana yang kondusif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan observasi partisipasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi sesuai dengan tradisi studi sosial. Dalam teknik pengumpulan data tersebut kedudukan peneliti sebagai *outsider* adalah observasi partisipasi. Melalui metode ini, peneliti diharapkan menjadi bagian dari masyarakat yang diteliti. Sedangkan kedudukan peneliti sebagai *insider*, akan memudahkan peneliti dalam mengkategorisasikan dan menerjemahkan makna-makna dari pola perilaku dan informasi yang ada dari aparatur.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pendapat Sutopo yang mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif terdapat tiga komponen utama dalam proses analisis data yakni: (1) Reduksi data. (2) Penyajian data. (3) Penarikan kesimpulan ataupun verifikasi.¹⁶ Ketiga proses analisis data tersebut berperan penting dalam proses dan

¹⁵ L. J. Moleong. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 3.

¹⁶ H.B. Sutopo. (2006). *Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 82.

saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Adapun untuk pengecekan keabsahan data dilakukan dengan, (1) Ketekunan pengamatan. (2) *Trianggulasi*. (3) Diskusi dengan teman sejawat.

4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Kebijakan Program Piloting Yang Dilaksanakan Oleh Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati Garut

Program piloting (program percontohan) atau yang disebut juga studi kelayakan adalah percobaan skala kecil yang membantu sebuah organisasi belajar bagaimana sebuah proyek skala besar akan bekerja dalam prakteknya. Melalui program piloting diharapkan dapat disiapkan dalam Peningkatan produktivitas domba akan bersifat permanen apabila diawali dengan pemanfaatan domba yang mempunyai keunggulan genetik (kualifikasi bibit) sesuai sifat yang diinginkan dan pemberian lingkungan yang sesuai. Oleh karena itu diperlukan program pembibitan tanpa menguras sumber daya genetik domba yang sudah dilestarikan. Untuk tujuan tersebut pembibitan yang dilaksanakan adalah pembibitan dalam satu rumpun atau dikenal sebagai pembibitan ternak murni.

Domba merupakan ternak yang memiliki sifat toleransi tinggi terhadap bermacam-macam pakan hijauan serta mempunyai daya adaptasi yang baik terhadap berbagai keadaan lingkungan. Pengembangan domba mempunyai prospek yang baik karena di samping untuk memenuhi kebutuhan daging di dalam negeri, juga memiliki peluang sebagai komoditas ekspor. Untuk mendukung pengembangan domba nasional di masa yang akan datang, jumlah dan mutu bibit merupakan faktor produksi yang sangat strategis dan menentukan keberhasilan program pembangunan peternakan.

Pembibitan domba saat ini masih berbasis pada peternakan rakyat yang berciri skala usaha kecil, manajemen sederhana, pemanfaatan teknologi seadanya, lokasi tidak terkonsentrasi dan belum menerapkan sistem dan usaha. Kebijakan pengembangan usaha pembibitan domba diarahkan pada suatu wilayah, baik wilayah khusus maupun terintegrasi dengan komoditas lainnya serta terkonsentrasi di wilayah untuk mempermudah pembinaan dan pengawasannya. Kelurahan Cibatu Kabupaten Garut sudah ditentukan kelompok program piloting tersebut yang disesuaikan dengan jumlah penduduk kelurahan, sesuai dengan data terlampir pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2 Jenis Bantuan Kelompok Program Piloting Tahun Anggaran 2016

Kecamatan	Desa	Jenis Bantuan Kelompok Program Piloting			
		Hewan Domba	Kandang	Pakan/Konsentrat	
Cibatu	Padasuka		65	25	10 Ton
		Tahap I	39	15	6 Ton
		Tahap II	26	10	4 Ton

Sumber: Kelompok Program Piloting Desa Padasuka Kecamatan Cibatu (2017)

Pada laporan ini hanya melaporkan bantuan pada kelompok program piloting Desa Padasuka Kecamatan Cibatu yang pada periode ini hanya baru bisa merealisasikan bantuan Tahap I TA 2016. Adapun Rencana bantuan Tahap I dapat dilihat seperti di bawah ini, dan Rencana bantuan ini sudah Terealisasi pada Bulan Oktober-November 2016. Sedangkan Rencana Penggunaan Bantuan Tahap I (60%), dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3 Rencana Bantuan Tahap I

No.	Jenis Usulan Kegiatan	Lokasi	Vol	Satuan	Nilai Usulan Kegiatan (Rp)	Sumber Pendanaan	
						APBN (Rp)	Swadaya (Rp)
1.	Hewan Domba	Desa Padasuka	39	Ekor	97.500.000	80.000.000	17.500.000
2.	Kandang		15	Unit	15.000.000	10.000.000	5.000.000
3.	Pakan/Konsentrat		5	Ton	4.000.000	3.500.000	500.000
Total					116.500.000	93.500.000	23.000.000

Sumber: Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati Garut (2017)

Adapun untuk APBN Tahap II ini masih dalam Proses:

- Identifikasi Kegiatan, Kelayakan usulan Tahun 2017 Tahap II.
- Koordinasi Balai terhadap Desa dan kelompok program piloting.
- Pembentukan kelompok serta pengurus untuk bantuan penyusunan proposal.
- Pendampingan proposal.
- Pendampingan pembuatan pemberkasan pemanfaatan.

Hasil dari kegiatan tersebut telah terbangun beberapa kesepakatan yang akan dijadikan rencana kerja tindak lanjut terhadap pelaksanaan bantuan, terdapat beberapa kendala permasalahan yang mencuat ke permukaan, yang secara umum dapat dibagi dalam dua kategori, yakni hambatan internal dan eksternal. Kendala internal yang paling menonjol dalam Tahun 2016 adalah dari segi kelembagaan yang belum paham tupoksi kelembagaan itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya banyak yang tidak efektif, terus koordinasi yang masih belum berjalan di Desa. Indikator paling nyata dalam konteks ini yang masih banyak keluhan dari masyarakat terhadap kondisi kesehatan domba serta masih belum pahamiya pengurusan domba yang baik. Upaya yang kini terus dilakukan untuk mengatasinya, yakni mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan program ini. Sedangkan hambatan eksternal yang terjadi terkait dengan pelaksanaan. *Pertama*, terkait dengan sosialisai kegiatan yaitu kurangnya keikutsertaan masyarakat. Tindak lanjutnya, yaitu bagaimana mencoba mengundang kembali kelompok program dalam setiap kegiatan. *Kedua*, dalam segi pelaksanaan kegiatan yaitu, kurangnya kepercayaan pada pembina kelompok, dalam melaksanakan program, sehingga pelaksanaannya tidak banyak pengurus kelompok yang paham. Tindak lanjutnya, yaitu dengan mengikutsertakan seluruh warga dan kelompok program dalam kegiatan program.

4.2 Kebijakan program piloting sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut

Kebijakan program piloting sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut, sebetulnya penyediaan bibit pejantan unggul untuk memperbaiki ternak rakyat. Agar kegiatan peternakan ternak dan ternak tumbuh lebih banyak, diperlukan upaya penyuluhan dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya petani di daerah pedesaan. Penetapan parameter dalam aspek kajian secara umumnya baru sampai pada tahapan *output*. Hal ini disebabkan penyusunan laporan merupakan hasil kerja satu Tahun di mana pada tahapan *outcome*, *benefit* maupun *impact* dan dapat dirasakan secara langsung masyarakat, meski masih berkekurangan, namun untuk beberapa indikator kebutuhan masyarakat ada yang sudah mencapai tahapan *outcome*, *Benefit* dan *Impact*.

Kebijakan program tersebut diarahkan pada pengentasan kemiskinan, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang peternakan melalui pemberdayaan usaha peternakan. Namun jika ditinjau lebih mendalam pada lokasi penelitian bahwa hasilnya, masih ada beberapa aspek yang belum tertangani. Kemudian secara umum komoditas domba terdistribusi, penyebaran populasi komoditas domba tersebut membuktikan bahwa berbagai pendistribusian domba memiliki tingkat kecocokan yang baik untuk pengembangan, baik kecocokan dari segi vegetasi, topografi, iklim, atau bahkan dari sisi sosial-budaya daerah setempat. Perkembangan peternakan domba sampai saat ini relatif jalan di tempat, perkembangan produksi dan produktivitasnya hampir tidak mengalami kemajuan berarti, hal ini diduga akibat pola pemeliharaannya yang masih bersifat tradisional dengan skala pemilikan yang kecil (*small holders*), kebanyakan dipelihara apa adanya tanpa suatu perencanaan yang jelas untuk lebih berkembang, lebih produktif, dan lebih menguntungkan, di samping itu jumlah pemotongan domba untuk kebutuhan lokal pun cukup tinggi, sehingga bila produktivitasnya tidak ditingkatkan dan dikembangkan secara komersial dan dalam skala yang besar.

Prasarana yang dibangun akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, namun akan berakibat pada tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan program ketika tidak dipelihara secara baik. Karena itu perlu adanya ketegasan, penanggung jawab dan rencana pengelolaan (pemanfaatan dan pemeliharaan) prasarana yang baik sesuai kebutuhan terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun. Dari segi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan memang sudah cukup maksimal akan tetapi ada yang menjadi permasalahan yaitu kurangnya informasi kepada masyarakat tentang program piloting. Informasi yang lengkap dan utuh merupakan suatu modal penting bagi masyarakat untuk memahami dengan baik tentang pentingnya program piloting. Pemahaman yang baik dan tepat akan mengembangkan kesadaran masyarakat untuk lebih berpartisipasi secara aktif demi pembangunan. Program piloting diarahkan dengan melalui pemberdayaan usaha peternakan.

Kelompok program piloting merupakan salah satu bagian pelaksanaan yang didanai program piloting secara stimulan untuk mengentaskan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin dengan memfasilitasi sarana perbibitan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (kompetensi) SDM pembibit, membentuk dan menguatkan kelompok peternak sebagai kelompok pembibit, menumbuhkan dan menstimulasi peternak secara individu maupun kelompok peternak dalam menerapkan pemurnian dan pelestarian serta menerapkan prinsip-prinsip pembibitan, serta memberi bantuan ternak domba, bantuan pakan tambahan, konsentrat dan bantuan pembuatan kandang, untuk bantuan kandang. Namun masyarakat sendiri yang menentukan jenis dan bentuk kegiatan prasarana dan sarana agar sejalan dengan kebutuhan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Potensi untuk mengembangkan domba sangat terbuka lebar, kebutuhan pangan dan pertanian dipenuhi oleh ternak, sehingga keberadaan ternak menjadi sangat strategis dalam hidup dan kehidupan masyarakat. Pengembangan potensi tersebut sebenarnya sangat terbuka lebar, hal ini didukung oleh (1) Sumber Daya Manusia, seperti Ilmuwan dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, balai-balai penelitian, (2) Kelembagaan yang terkait dengan domba dan kambing, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

5 Kesimpulan

Penanggulangan kemiskinan dalam bentuk program piloting memerlukan pemihakan dari organisasi dan lembaga pemerintah mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota bahkan sampai tingkat Pusat. Program piloting merupakan salah satu program pemerintah pusat yang berupaya untuk menanggulangi kemiskinan di daerah, maka dengan adanya pelaksanaan program piloting masyarakat dapat terangkat perekonomiannya dengan bantuan-bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat tersebut. Program piloting sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bidang peternakan melalui pemberdayaan usaha peternakan, modal sosial akan efektif memberikan dorongan keberhasilan bagi berbagai kebijakan, sehingga dengan adanya penguatan modal sosial diharapkan mampu menumbuhkembangkan energi sosial yang dapat menggerakkan proses dan dinamika pembangunan secara mandiri.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fisher, B. Aubrey. (1978). *Teori-Teori Komunikasi*, terjemahan Soejono Trimono. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar, Nul Zainul. (2017). *Kemiskinan Di Garut Fluktuatif*. (Online).
(<http://www.inilahkoran.com/berita/jabar/70965/kemiskinan-di-garut-fluktuatif>)
- Setiadi, Nugroho J.. (2003), *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenanda Media.
- Sutopo, H.B. (2006). *Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Tachjan (2006), *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Tanjung, Abdul Hafiz. (2009). *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Ubaedillah, A. dan Rozak, Abdul. (2006). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE-UIN Syarif Hidayatullah.
- Usman, Sunyoto. (2003). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. (2005), *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.